

**POTRET POLITISI PEREMPUAN KABUPATEN
DHARMASRAYA
(STUDI TENTANG POTRET ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN KABUPATEN DHARMASRAYA PERIODE
TAHUN 2019-2024)**

***PORTRAIT OF WOMEN POLITICIANS IN DHARMASRAYA
REGENCY
(STUDY ON THE PORTRAIT OF WOMEN LEGISLATIVE
MEMBERS OF DHARMASRAYA REGENCY FOR THE 2019-
2024 PERIOD)***

Weli Andola¹, Novi Budiman²

¹Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: weliandola19@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: novibudiman@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Tergambar bahwa perempuan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Dharmasraya, masih menghadapi berbagai kendala dalam memasuki dan bertahan dalam dunia politik. Budaya patriarki, kendala internal seperti peran domestik, dan kendala eksternal seperti sistem politik yang masih memihak laki-laki menjadi faktor-faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang potret anggota legislatif Perempuan Kabupaten Dharmasraya pada periode Tahun 2019-2024, strategi anggota legislatif Perempuan dalam memenangkan Pileg di Kabupaten Dharmasraya, dan peran anggota legislatif Perempuan Kabupaten Dharmasraya dalam pembentukan kebijakan lokal. Metode penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Dharmasraya masih belum memenuhi kuota 30 %. Minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya hanya terdapat 2 Caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen: Elisa Septiani dan Sismi Erli. Strategi yang digunakan legislatif dalam memenangkan pemilihan umum legislatif antara lain: peumusan visi dan misi, penilaian situasi dan Evaluasi Peran DPRD perempuan Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk representasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan responsif gender terkait Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Karna pemikiran dan perasaan Perempuan akan mampu berkolaborasi untuk mengutamakan kebijakan responsive gender yang sedang berlangsung. Maka dari itu peran politisi Perempuan ini sangat penting dalam proses pembuatan sampai lahirnya peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024.

Kata kunci: Partisipasi, Keterwakilan Perempuan, kesetaraan Gender

Abstract

It is illustrated that women in Indonesia, including in Dharmasraya Regency, still face various obstacles in entering and surviving in politics. Patriarchal culture, internal constraints such as domestic roles, and external constraints such as a political system that still favors men are the main factors that hinder women's participation in politics. So this research aims to find out how the portrait background of female legislative members of Dharmasraya Regency in the 2019-2024 period, the strategy of female legislative members in winning Pileg in Dharmasraya Regency, and the role of female legislative members of Dharmasraya Regency in the formation of local policies. This research method uses a qualitative method. The data collection techniques that researchers use are observation, interviews and documentation. The data obtained were analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Women Legislative Members of Dharmasraya Regency still do not meet the 30% quota. The lack of women's representation in the 2019 legislative elections held in Dharmasraya Regency only had 2 female candidates who managed to occupy parliamentary seats: Elisa Septiani and Sasmi Erli. The strategies used by the legislature in winning the legislative general election include: formulation of vision and mission, assessment of the situation and evaluation of the role of the Dharmasraya Regency Women's DPRD as a form of community representation in controlling gender responsive policies related to development in Dharmasraya Regency. Because women's thoughts and feelings will be able to collaborate to prioritize ongoing gender-responsive policies. Therefore, the role of women politicians is very important in the process of making until the birth of the 2019-2024 Dharmasraya Regency regional regulations.

Keywords: *Participation, Women's Representation, Gender equality*

PENDAHULUAN

Melalui analisis data pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya, terlihat bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam meraih posisi politik. Meskipun terdapat partai-partai yang mencalonkan perempuan sebagai kandidat, namun jumlah mereka masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kandidat laki-laki. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan, baik dari segi internal partai maupun faktor-faktor eksternal seperti budaya dan struktur sosial.

Selain itu, terlihat pula bahwa meskipun terdapat kebijakan kuota untuk keterwakilan perempuan dalam partai politik, namun implementasinya masih belum optimal. Rendahnya jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partai politik agar lebih memperhatikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Hal ini juga menandakan pentingnya

analisis terhadap faktor-faktor internal dalam partai politik yang mungkin menjadi penghalang bagi keterlibatan aktif perempuan dalam politik.

Hal ini menggambarkan kondisi politik di Kabupaten Dharmasraya, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam arena politik. Meskipun terdapat upaya pemerintah dan kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, seperti rendahnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD. Meski telah ada regulasi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, namun masih belum tercapai secara optimal. Pemilu tahun 2019 menunjukkan perbandingan yang jauh antara kandidat perempuan dan laki-laki, dengan hanya dua perempuan yang terpilih dari 30 anggota DPRD. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai potret politisi perempuan di Kabupaten Dharmasraya guna memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan keterwakilan mereka dalam politik lokal.

Sejalan dengan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini maka perlu mendeskripsikan beberapa kajian yang terkait. Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Teori struktural-fungsional adalah teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini menjadi sumber utama adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah system (Kurnia, 2017). Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.

Strategi pemenangan dilakukan dalam upaya meningkatkan jumlah massa pemilihnya, dalam hal ini harus ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan

dan pemikiran yang positif terhadap kandidat dan partai pengusungnya, sehingga nantinya kampanye pemenangan dapat dilaksanakan oleh partai dan kandidat dapat berjalan baik dan berhasil. Strategi-strategi marketing memang sudah saatnya diterapkan dalam politik. Marketing politik adalah suatu cabang atau ranting ilmu sosial interdisipliner. Paling tidak dua cabang ilmu sosial menyusun marketing politik, yaitu ilmu Marketing dan ilmu politik. Seperti halnya dalam perpaduan atau percabangan ilmu sosial lainnya, tak pelak lagi marketing politik disertai polemik yang masih hangat hingga saat ini. Apalagi bilah di ingat betapa secara hakiki terdapat perbedaan antara marketing dan politik. terutama bilah sudah berbicara tentang etika.

Politik merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan negara. Politik juga bisa disebut sebagai interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara (Wahyudi, 2019).

Upaya untuk memastikan bahwa kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta mengelola dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh, merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan bangsa. Hal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memastikan bahwa setiap langkah politik yang diambil konsisten dengan kerangka dasar negara. Dengan demikian, upaya untuk memperjuangkan penerapan dan pengelolaan politik yang sesuai dengan prinsip NKRI menjadi fokus utama dalam membangun tatanan politik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Sartori memberi pengertian partai politik sebagai kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk dalam legislatif dan pemerintahan (Budiardjo, 2013). Berdasarkan dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisasi, ditandai dengan adanya visi, misi, dan tujuan yang

sama serta mengikuti pemilihan umum untuk untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya.

Fungsi partai politik milik Miriam Budiardjo selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemilihan umum adalah sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah Negara yang menganut paham demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. (Irfani, 2018). Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengikuti beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi. Pertama, pemilu harus diselenggarakan secara mandiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga netralitas dan independensi. Kedua, pemilihan umum harus mewakili berbagai

kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional. Selanjutnya, pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan atau manipulasi hasil. Penyelenggara harus bertindak secara profesional, adil, dan akuntabel, serta menjalankan proses pemilu berdasarkan hukum yang berlaku dengan efektif, tertib, dan efisien. Proses tersebut harus juga dilakukan secara terbuka dan transparan, memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses pemilihan umum. Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada penelitian relevan terdahulu, Inna Junaenah 2014 Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis Persamaan dari penelitian Inna Junaenah dengan peneliti ini ialah kesetaraan perempuan itu sama serta tidak yang membedakan derajatnya. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini yaitu lokasi dan fokus penelitian, penelitian ini lebih fokus kepada Partisipasi terhadap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, sedangkan penelitian peneliti itu lebih fokus kepada potret politisi perempuan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Loura Hardjaloka, 2012 Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama membahas tentang potret keterwakilan perempuan yang mana sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan dalam memenangkan suatu kontestan sedangkan perbedaannya ialah lokasi dan fokus penelitian, penelitian ini lebih fokus kepada Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi sedangkan penelitian peneliti ini lebih fokus kepada Potret Politisi Perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di beberapa Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum diantaranya Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai Potret Politisi Perempuan Kabupaten Dharmasraya (Studi tentang Potret Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Dharmasraya Periode Tahun 2019-2024). Penelitian ini dilakukan pada 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024. Berikut adalah jadwal waktu pelaksana penelitian.

Instrumen penelitian Kualitatif ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya relevan. (Aprilyada,2023). Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, alat perekam , pensil ballpoint, dan buku. Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data Miles and Huberman, bahwa dalam analisis data ada tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2019:323).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56" Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21" BT -- 1010 54' 27" Bujur Timur (BT). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya disingkat DPRD Kabupaten Dharmasraya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat di DPRD Kabupaten Dharmasraya memiliki 30 kursi anggota legislatif yang diduduki oleh 10 partai politik yaitu Partai PKB, Hanura, Demokrat, PKS, Berkarya, NasDem, Gerindra,

PAN, Golkar, PDI-P dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Potret Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Dharmasraya pada Periode Tahun 2019-2024

Alisa Septiani lahir di Asam Jujuhan pada 16 September 1997, Alisa merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Juprizal dan Hj. Kasdariah. Alisa salah seorang siswi tamatan dari SDN 03 Asam Jujuhan setelah itu melanjutkan Pendidikan di MTSN Palangki kemudian SMA Kartika 1-5 Padang, Alisa melanjutkan Pendidikan nya di Universitas Widyatama Bandung sampai semester 5 dengan jurusan Akuntansi. Ayah Alisa bekerja sebagai tokeh karet dan ibu sebagai ibu rumah tangga, ayahanda nya yang dikenal dengan sosok baik dan suka membantu Masyarakat yang kurang mampu di daerah nya. Ayah nya sangat membantu Masyarakat yang ada di Asam Jujuhan baik itu di bidang Pendidikan maupun dalam bidang sosial lainnya. Ayah nya ini sangat menjunjung tinggi nilai sosial sehingga ia di kenal terutama kalangan masyarakat bawah.

Sasmi Erli lahir pada 16 Maret 1972 di Kabupaten Dharmasraya. Sasmi Erli berasal dari Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Ampek dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, Sasmi Erli sudah memiliki suami yang bernama Mulyadi dan sudah di karunai 4 orang anak. Sasmi Erli tamatan SD Negeri Silago, lalu melanjutkan ke SMP Negeri Sungai Dareh setelah itu melanjutkan Pendidikan ke SMEA Budi Mulia Solok kemudian Sasmi Erli melanjutkan Pendidikan perguruan tingginya sampai D3 di STAI YKI Sumatera Barat, dan melanjutkan S1 nya di STAI Yastis Padang.

Sasmi Erli terkenal sangat baik, lemah lembut, sopan santun dan sangat peduli dengan masyarakat. Sasmi Erli juga sangat mementingkan kepentingan masyarakat terutama hal Pendidikan nya. Sasmi Erli sebelum menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya pernah menjadi penyelenggara di PAUD Palito Bundoi, dan juga pernah menjadi salah seorang guru di RA Ar-Rahim.

Strategi anggota legislatif Perempuan dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Dharmasraya periode Tahun 2019-2024

Alisa Septiani, dalam proses pencalonannya sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum periode 2019-2024, diterima dengan apresiasi karena kemampuannya dalam mencalonkan diri dan berkompetisi dalam pesta demokrasi. Strategi yang dijalankan adalah mendekati diri kepada masyarakat luas dengan fokus pada pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka secara setara dalam ranah publik. Dalam visinya, Alisa ingin melibatkan kaum muda, khususnya perempuan, dalam menyuarakan aspirasi rakyat, dengan harapan bahwa kepemimpinannya akan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu, Alisa berkomitmen untuk menyusun program-program yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi, pertanian, perdagangan, dan infrastruktur, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dan pemangku adat.

Sasmi Erli, seorang kandidat lain dalam konteks pemilihan legislatif yang sama, menekankan pentingnya pendidikan dalam memajukan daerahnya, yakni kabupaten Dharmasraya. Beliau mengkhawatirkan dampak negatif media sosial terhadap generasi muda dan memandang pentingnya peran pendidikan dalam membangun karakter serta pengetahuan anak-anak. Sasmi Erli juga berkomitmen untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan masyarakat, dengan tujuan memperoleh dukungan untuk mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Dharmasraya. Strategi yang digunakan adalah pendekatan langsung kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, Sasmi Erli juga memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan dengan memberikan bantuan alat pelindung diri kepada tenaga medis di puskesmas, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Peran Anggota Legistalif Perempuan Kabupaten Dharmasraya dalam Pembentukan Kebijakan lokal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi untuk mewakili kepentingan masyarakat di tingkat kabupaten. Dalam periode 2019-2024, peran anggota dewan perempuan menjadi fokus penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi mereka dalam proses legislasi. Meskipun terdapat norma-norma yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, seperti hak inisiatif legislatif, kenyataannya pelaksanaannya belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah kebijakan responsif gender yang dihasilkan serta kurangnya kehadiran perempuan dalam setiap rapat yang dapat mengurangi efektivitas peran mereka dalam menjalankan fungsi legislasi.

Tantangan utama yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Dharmasraya adalah keterbatasan jumlah mereka yang menyebabkan peran mereka dalam menjembatani kepentingan perempuan menjadi kurang optimal. Meskipun demikian, kehadiran mereka tetap dinantikan oleh masyarakat karena dianggap dapat memberikan dampak positif, terutama dalam hal responsif gender. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi dan kontribusi anggota dewan perempuan dalam proses legislasi menjadi penting untuk memastikan representasi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum perempuan, dalam pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

Temuan penelitian menggambarkan dinamika peran perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks Kabupaten Dharmasraya. Dalam latar belakang potret anggota legislatif perempuan, terlihat bahwa perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai akses politik dan jabatan politik yang setara dengan laki-laki. Perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam rekrutmen politik di partai politik, serta terbatasnya akses dan pengaruh perempuan dalam posisi politik tingkat tinggi. Namun, narasumber Alisa Septiani dan Sasmi Erli membuktikan bahwa dengan motivasi dan tekad yang kuat, perempuan mampu meraih posisi politik yang signifikan, bahkan di usia yang relatif muda, dengan latar belakang keluarga yang berpengaruh di dunia politik.

Strategi anggota legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan umum legislatif di Kabupaten Dharmasraya menyoroti langkah-langkah sistematis yang diambil untuk mencapai kemenangan politik. Melalui perumusan misi, penilaian situasi dan evaluasi, perumusan sasaran, target citra, kelompok target, pesan kelompok target, instrumen strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi, narasumber Alisa Septiani dan Sasmi Erli menghadapi tantangan politik dengan langkah-langkah strategis yang terencana. Mereka menggunakan kekuatan dan kelemahan mereka serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik, baik itu dalam hal dukungan partai politik, dukungan keluarga, maupun dukungan tim sukses.

Dalam implementasi strategi politik mereka, narasumber Alisa Septiani dan Sasmi Erli menyadari pentingnya faktor manusia dalam kesuksesan sebuah strategi politik. Hubungan yang baik antara pimpinan politik, pimpinan partai, dan anggota partai menjadi kunci penting dalam mengimplementasikan strategi secara efektif. Selain itu, mereka juga memperhatikan aspek operasional dan pengendalian strategi, dengan mengumpulkan data intelijen, melindungi informasi, serta menjaga citra diri dengan hati-hati.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa fakta sebagai berikut Latar belakang politisi Dharmasraa yaitu terdapat 2 Caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen diantaranya Elisa Septiani dan Sasmi Erli. Strategi yang digunakan legislatif dalam memenangkan pemilihan umum legislatif antara lain yaitu perumusan visi dan misi, penilaian situasi dan Evaluasi. Peran DPRD perempuan Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk representasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan responsif gender terkait Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Karna pemikiran dan perasaan Perempuan akan mampu berkolaborasi untuk mengutamakan kebijakan responsive gender yang sedang berlangsung. Maka dari itu peran politisi Perempuan ini sangat penting dalam proses pembuatan sampai lahirnya peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Rabawiyah*, 12(01).
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erli, S. (2023). Wawancara penelitian
- Irfani, F. (2018). Islam dan Budaya Banten. *Buletin Al-Turas*, 16(1), 200–216
- Septiani, A. (2023). Wawancara penelitian.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83
- Yudi, K. (2017). Proses politik dalam wacana pemekaran provinsi madura. *Artikel*, 53(9).
- Zamrodah, Y. (2016). *Pemilihan Umum Dan Partai Politik*. 15(2), 1–23